

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TERNATE

Jalan Pengayoman, No.1, Kel. Jambula, Kec. Pulau Ternate

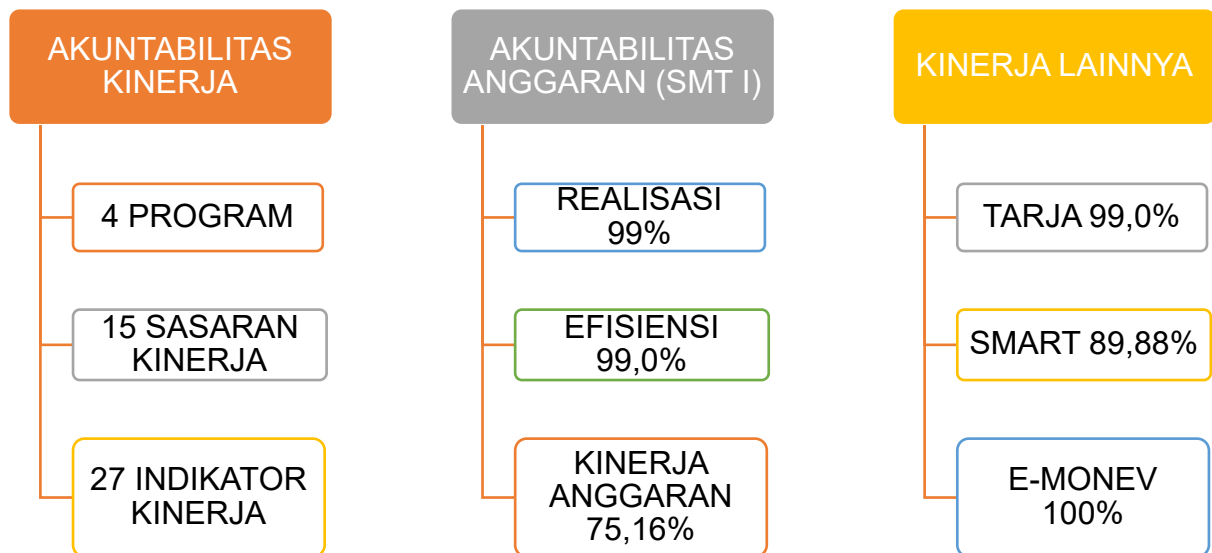
Laman: lapasternate.kemenkumham.go.id



IKHTISAR EKSEKUTIF

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate sebagai salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki 15 Sasaran Strategis dan 27 Indikator Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis dari 4 Program Utama yang diemban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tidak semua Indikator Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Semester II Tahun 2023 tercapai, hal ini disebabkan beberapa program/kegiatan direncanakan dilaksanakan di Semester II belum terlaksana sesuai yang direncanakan.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Semester II Tahun 2023 mencapai **99,05%** atau sebesar **Rp. 350.000.000.000,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 350.000.000.000**. Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100% karena realisasi anggaran yang tidak sesuai Disbursement Plan dan pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir Tahun. Namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan yang dilaksanakan, maka dapat dikatakan melaksanakan program kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate berjalan cukup efisien dengan nilai efisiensi sebesar **99,05%** berdasarkan aplikasi SMART. Sedangkan Capaian Kinerja Anggaran yang didapatkan dari bobot nilai SMART dan IKPA didapatkan angka **99,08%**. Keaktifan dalam pengisian aplikasi E-Monev Bappenas juga membuahkan hasil dengan nilai **100%** pada Januari – Desember 2023 (kategori hijau).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ternate telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Semester I Tahun 2023. Sesuai dinamika perkembangan yang terjadi.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana peraturan tersebut telah menggantikan peraturan yang lama yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana kedua peraturan yang lama tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Laporan Kinerja ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

Ternate, 30 Juni 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan,



Dedy Setawan, Bc.IP., S.H
NIP. 196702281990031004

**“PRESTASI YANG DIPEROLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
TERNATE TAHUN 2023”**

Memperoleh penghargaan sebagai UPT Terbaik dalam kategori
“PELAYANAN KESEHATAN”



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
PRESTASI SATUAN KERJA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Wewenang.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	7
D. Aspek Strategis	8
E. Isu Strategis	9
F. Sistematika Laporan	10
BAB II PERENCANAAN	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Perjanjian Kinerja tahun 2023	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
B. Realisasi Anggaran	73
C. Capaian Kinerja Lainnya	73
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Rencana Tindak Lanjut	78
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang pemasyarakatan narapidana/anak didik. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate dibangun tahun 2001 dan selesai pada tahun 2002. Dibangunnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate berkaitan dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Utara menjadi Provinsi Maluku Utara pada tahun 1998, dimana dalam suatu Wilayah Provinsi disyaratkan adanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate.

Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate, serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Untuk melakukan pelaporan pengukuran.

Pencapaian kinerja pada Tahun 2023, maka dibuatkan LKjIP Tahun 2023. Dalam LKjIP Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate ini difokuskan pada pencapaian kinerja selama tahun 2023.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan Juni tahun berjalan.

Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate;
2. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate selama periode januaril sampai dengan Desember tahun berjalan;
3. Untuk bahan masukan bagi Jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

B. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate, berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia pada tahun 2023.

1. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Berdasarkan Jenis Kelamin:

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin



2. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Berdasarkan Pangkat.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat

JENIS KELAMIN	GELOMBANG												JML
	II				III				IV				
	A	b	c	d	A	b	c	d	a	b	c	d	
Pria	1	21	4	7	17	1	1	4	2				
Wanita		2	1		4		1	3					
Jumlah	1	23	5	7	21	1	2	7	2				

3. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	SD			
2	SMP			
3	SLTA	47	5	
4	Diploma	1	1	
5	Sarjana	10	4	
6	S2	1		
7	S3			
Jumlah		59	10	

4. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Berdasarkan Sub Seksi.

Tabel 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Sub Seksi

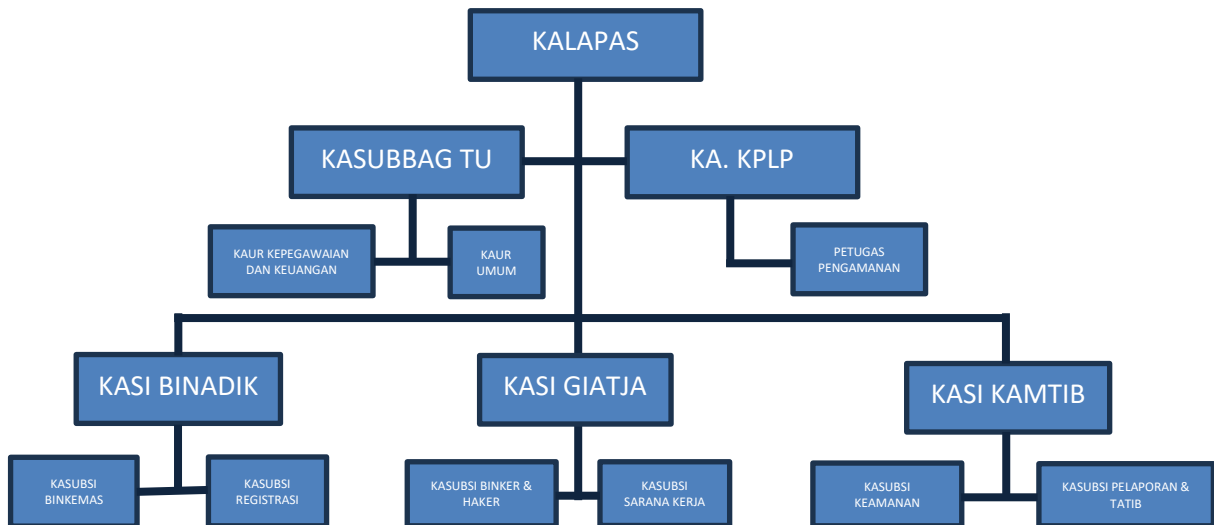
No	Jenis Tugas	Pria	Wanita	Jumlah
1	Pejabat Eselon III	1		
2	Pejabat Eselon IV	4	1	
3	Pejabat Eselon V	6	2	
4	Fasilitatif	14		
5	Pembinaan	3		
6	Pengamanan	36	4	
7	Perawatan Kesehatan		1	
8	Perawatan Makanan		1	
Jumlah		64	9	

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik.

2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/ anak didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

STRUKTUR ORGANISASI



Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ternate dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasarakatan yang membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha	
Tugas	Fungsi
Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan.	a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan urusan keuangan. b. Urusan Umum Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Seksi Binapi)

Tugas	Fungsi
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemsarakatan narapidana.	<p>a. Sub Seksi registrasi Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.</p> <p>b. Sub Seksi bimbingan Pemsarakatan dan Perawatan (Sub Seksi Bimaswat) Memberikan bimbingankemasyarakatan.Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana</p>

3. Seksi Kegiatan Kerja

Tugas	Fungsi
Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja	<p>a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.</p> <p>b. Sub Seksi Sarana Kerja Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.</p>

4. Seksi Administrasi Keamanan dan tata Tertib

Tugas	Fungsi
Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang	<p>a. Sub Seksi Keamanan Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan;</p> <p>b. Sub Seksi Pelaporan dan tata Tertib Sub Seksi Pelaporan dan tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakan tata tertib.</p>